

**PENGARUH KELEMAHAM SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL DAN KETIDAKPATUHAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI AUDIT
LAPORAN KEUANGAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro**

Disusun oleh

**CINDY FARAH NOOR DESTIKA
12030112110083**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Cindy Farah Noor Destika
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112110083
Fakultas / Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KELEMAHAM SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN
KETIDAKPATUHAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP
OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN DI
INDONESIA**
Dosen Pembimbing : Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, Maret2016

Dosen Pembimbing

(Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 196808271992021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Cindy Farah Noor Destika
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112110083
Fakultas / Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH KELEMAHAM SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN
KETIDAKPATUHAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP
OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN DI
INDONESIA
Dosen Pembimbing : Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 26 Mei 2016

Tim Penguji

1. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)

2. Dr. Indira Januarti SE., M.Si., Akt. (.....)

3. Moh. Didik Ardiyanto, SE., M.Si.Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Cindy Farah Noor Destika, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PENGARUH KELEMAHAM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KETIDAKPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN DI INDONESIA** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah olah sebagian tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Maret 2016

Yang membuat pernyataan

(Cindy Farah Noor Destika)
NIM. 12030112110083

ABSTRAKS

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ingin menguji secara empiris pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini audit laporan keuangan di Indonesia.

Sampel penelitian sebanyak 60 pemerintah daerah yang disurvei oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan. Teknik analisis data menggunakan regresi logistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara Kelemahan Sistem Pengendalian Internal terhadap Opini Audit Laporan Keuangan; Ketidakpatuhan pada Undang-undang tidak berpengaruh terhadap Opini Audit Laporan Keuangan. Dan besarnya pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan pada Undang-undang hanya sebesar 31,8% dalam mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan.

Kata Kunci : opini audit laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan

ABSTRACT

The aim of this study wanted to test empirically the effect of the weakness of internal control systems and adherence to laws and regulations of the financial statement audit opinion in Indonesia.

The research sample of 60 local authorities surveyed by the KPK and the BPK. Data were analyzed using logistic regression.

The results showed that there was a significant and positive influence between the weakness of the Internal Control System Audit Opinion Financial Statements; Disobedience to the law does not affect the Financial Statement Audit Opinion. And the effect of the Internal Control System Weaknesses and adherence to the Act only amounted to 31.8% in the influencing Audit Opinion Financial Statements.

Keywords: financial statement audit opinion, the weakness of the internal control system, and adherence to legislation

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Inna allaaha laa yughayyiru maa biqawmin hattayughayyiruu maa bi-anfusihim”
“... Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

-Q.S.Ar Ra'd: 11-

“A person who never made a mistake never tried anything new”. “... Seseorang, yang tidak pernah membuat suatu kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru.”

-Albert Einstein-

“Benarlah. Jika kalian sedang bersedih, jika kalian sedang terpagut masa lalu menyakitkan, penuh penyesalan seumur hidup, salah satu obatnya adalah dengan menyadari masih banyak orang lain yang lebih sedih dan mengalami kejadian lebih menyakitkan dibandingkan kalian.. Itu akan memberikan pengertian bahwa hidup ini belum berakhir. Itu akan membuat kita selalu meyakini: setiap makhluk berhak atas satu harapan”

-Tereliye-

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Mama, Papa, dan Eyang
- Orang-orang yang aku sayangi,
- Almamter

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbilalamin, penulis ini memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga akhirnya penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Dan Ketidapatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Di Indonesia”** ini dapat menyelesaikan dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Program Strata (S1) Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Diponegoro Semarang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan sebuah itikad dan semangat untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian ilmu pengetahuan, khususnya Akuntansi. Penulis menyadari bahwa karya ini hanya sebagian kecil dari ribuan karya yang lainnya, namun penulis berharap agar karya ini tetap memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, arahan, dan doa dari berbagai pihak yang turut terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus memberikan ucapan terima kasih kepada :

- 1 Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dan merupakan sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
- 2 Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- 3 Bapak Fuad, S.E.T, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- 4 Bapak Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bimbingan, koreksi, arahan yang sangat berharga bagi penulis.
- 5 Bapak Dr. Darsono, SE., MBA. ,Akt. Selaku dosen wali yang telah menjadi orang tua penulis selama di kampus.
- 6 Semua pendidik dan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi penulis.
- 7 Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam kelancaran proses administrasi.
- 8 Orangtua ku tercinta, Mama Wayan, Papa Gunawan serta Eyang Wahyuni yang tidak henti-hentinya memberikan doa, arahan, perhatian, serta dukungan baik moril maupun materiil selama ini.
- 9 Seluruh keluarga besar senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doanya.

- 10 Sahabat-sahabat ku seperjuangan dikampus yaitu “CABE SYARIAH” terdiri dari maida, alsa, isti, sely, cornel dan “TIM HORE” terdiri dari Desita, Wulan, Ulin, Krisma, Novia, Laila yang tiada henti memberikan semangat, terus berjuang teman, semoga apa yang kita impikan masing-masing dapat tercapai.
- 11 Teman Main yaitu Astri, Lovly, Arin, Tanaya yang senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- 12 Sahabat-sahabatku yang di Pemalang yaitu “TIM JUWET” terdiri dari Novi, Nonik, Tita, Ema, Defi, Cimot serta Windy dan Sahabat-sahabatku yaitu “GEMBEL” terdiri dari linggar, dewi, wilda, puti, ilma yang tiada henti nya memberikan semangat kepada penulis dan semoga kita semua mencapai cita-cita yang selalu diinginkan.
- 13 Teman dari kecil sampai sekarang yaitu Riries dan Amel yang selalu memberikan support serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
- 14 Teman satu bimbingan Pak Agus. Terima kasih sudah berbagi semangat dan dukungannya.
- 15 Teman-Teman regular Akuntansi 2012 yang dengan telah memberikan kebersamaan selama 4 tahun ini, sukses selalu buat kita semua.
- 16 Teman-Teman KKN Desa GANDU WETAN terdiri dari mba vika, mas jaya, okvan, septi, riri, devy, weny, bayu yang senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

- 17 Keluarga U-house banjarsari no 56 B Semarang : kak Vierza, Sabrina, Sheli, Astuti yang senantiasa memberikan semangat hingga terselesaikan tugas akhir ini.
- 18 Teman-Teman IMP UNDIP (Ikatan Mahasiswa Pemalang), yang sudah menjadi saudara senasib seperjuangan merantau, semoga cita-cita masing-masing dapat tercapai.
- 19 Teman Sekolah yaitu PENSIL yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
- 20 Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Maret 2016
Penulis

Cindy Farah Noor Destika

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TELAAH PUSTAKA	
2.1.Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	10
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency theory</i>)	10

2.1.2. Akuntabilitas dan pelayanan publik.....	11
2.1.3. Latar belakang kelembagaan dan analisis Teoritis Audit Pemerintahan.....	14
2.1.4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	18
2.1.5. Pemerintahan daerah dan pemerintah daerah.....	18
2.1.6. Pemerintah daerah dan pelayanan publik.....	19
2.1.7. Badan pemeriksa keuangan.....	21
2.1.8. Laporan keuangan pemerintah daerah.....	22
2.1.9. Opini hasil BPK.....	23
2.2. Penelitian Terdahulu	30
2.3. Kerangka Pemikiran.....	31
2.4. Hipotesis	34
2.4.1. Pengaruh kelemahan sistem pengendalian Intern terhadap audit laporan keuangan Pemerintah daerah.....	34
2.4.2. Ketidakpatuhan pada perundang-undangan Terhadap audit laporan keuangan Pemerintah daerah.....	37
 BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Definisi Operasional Variabel.....	40
3.1.1. Variabel Terikat (<i>Dependent Variabel</i>).....	40
3.1.2. Variabel Bebas (<i>Independent Variabel</i>).....	41

3.2. Populasi dan Sampel	46
3.3. Jenis dan Sumber Data	48
3.4. Metode Pengumpulan Data	48
3.5. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	49
3.5.1. Analisis deskriptif	49
3.5.2. Persamaan Regresi Logistik.....	50
3.5.3. Menilai kelayakan model regresi (<i>goodness of fit</i>).....	50
3.5.4. Menilai keseluruhan model (<i>goodness of fit</i>).....	51
3.5.5. Menilai Koefisien regresi.....	51

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Penelitian	52
4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif	53
4.3. Persamaan Regresi Logistik.....	60
4.4. Penilaian model fit.....	61
4.5. Uji Hipotesis.....	62
4.5.1. Pengujian dengan multivariate test.....	62
4.5.2. Koefisien determinasi.....	64
4.6. Pembahasan.....	64
4.6.1. Pengaruh kelemahan SPL.....	64
4.6.2. Pengaruh ketidakpatuhan undang-undang.....	66

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.Kesimpulan	68
5.2.Saran	68
5.3.Keterbatasan	69
5.4.Agenda Penelitian Selanjutnya	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN–LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. : Ringkasan Definisi Operasional Variabel	46
Tabel 4.1. : Data Pemerintah Daerah.....	53
Tabel 4.2. : Statistik Deskriptif.....	54
Tabel 4.6 : Uji Regresi Logistik.....	61
Tabel 4.7. : Pengujian Model Fit	63
Tabel 4.8. : Hasil Pengujian Multivariate	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah	20
Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran Penelitian	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Penelitian
- Lampiran 2 : Input Data SPSS
- Lampiran 3 : Statistik Deskriptif
- Lampiran 4 : Output Regresi Logistik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan dibentuk oleh suatu masyarakat (penduduk) atas dasar suatu kontrak sosial untuk mengatur tertib sosial masyarakat agar kepentingan yang saling berbenturan dapat diatur sedemikian rupa, sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar (Budi Setiono, 2004). Selain itu pemerintahan juga dibentuk untuk melakukan usaha pencapaian tujuan Negara sesuai kehendak yang ingin dicapai oleh seluruh rakyat. Dalam konteks ini menurut Ryaas Rasyid (2004), institusi pemerintahan memiliki tujuh fungsi atau tugas pokok yaitu: menjamin keamanan, memelihara ketertiban, menjamin keadilan, melakukan pekerjaan umum, meningkatkan kesejahteraan, dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Menurut Mardiasmo (2006) dalam konteks integritas pemerintahan daerah relasi antara pemerintah dan masyarakat tersebut terdapat hubungan keagenan (*agency theory*) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai agen. Menurut Lane (2000) teori keagenan dapat diterapkan dalam konteks organisasi publik. Ia menyatakan bahwa dalam negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen.

Pemerintah Indonesia berusaha membuat peraturan-peraturan yang dapat menciptakan integritas pemerintahan daerah. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan diterbitkannya paket Undang-Undang bidang Pengelolaan Keuangan yaitu UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan UU No. 25 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut kemudian diturunkan dalam peraturan pelaksanaan, salah satunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, diperuntukkan pada masyarakat akuntansi peraturan ini sebagai sejarah karena sebelumnya sektor pemerintahan belum memiliki standar akuntansi, terhitung sejak kemerdekaan Republik Indonesia (Indrawati, 2010).

Perkembangan selanjutnya PP 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis akrual. Selain itu, Pemerintah menetapkan Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah sebelumnya yaitu PP No. 105 Tahun 2000 mengenai Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan integritas pemerintahan daerah sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pengelolaan pemerintahan di Indonesia telah menerapkan sistem otonomi, Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, kecuali bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan peraturan pemerintah (Muhamad Shodiqun, 2007).

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. (Penjelasan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Otonomi daerah yang luas yang telah diberikan kepada daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan integritas pemerintahan daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai *good government governance* (Muhamad Shodiqun, 2007).

Pendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri dari 4 opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian menjelaskan laporan keuangan yang disajikan, telah dilaporkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan mengenai laporan keuangan.

Opini Wajar Dengan Pengecualian menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan, telah dilaporkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali dampak-dampak terkait dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Opini Tidak Wajar menjelaskan tentang laporan keuangan yang tidak disajikan dan tidak diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat menjelaskan tentang laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar

pemeriksaan. Oleh karena itu, pemeriksa tidak mampu memberi ketetapan mengenai laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, oleh karena itu informasi keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi opini audit pemerintah daerah antara lain : kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap opini audit pemerintah daerah yaitu kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan temuan audit dalam Sistem Pengendalian Intern pada semua entitas yang diperiksa. Hasil laporan temuan audit ini menjelaskan mengenai kelemahan sistem pengendalian internal pada berbagai pemerintah daerah. Hasil evaluasi sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan kasus kelemahan pengendalian internal sebagai kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian internal. Banyaknya kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah menunjukkan rendahnya tingkat integritas pemerintahan daerah yang akan meningkatkan terjadinya korupsi di pemerintahan daerah, sehingga mengakibatkan opini audit pemerintah daerah menjadi buruk.

Faktor kedua yang mempengaruhi opini audit pemerintah daerah yaitu ketidakpatuhan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan ketaatan pada aturan yang dijelaskan dalam Undang-undang berguna untuk deteksi adanya salah saji material yang disebabkan adanya ketidakpatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Hasil audit kepatuhan pada aturan undang-undang atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena atau permasalahan berkaitan dengan masih belum optimalnya integritas pemerintah daerah yang dibuktikan dengan permasalahan korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah. Seperti yang terjadi tahun 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan ada 73% perkara yang ditangani adalah korupsi di daerah (KPK, 2010). Dari data yang disurvei oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pada pemerintahan daerah terjadi kelemahan dalam sistem pengendalian internal dimana dari survey yang dilakukan kepada 60 pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat 681 temuan kasus yang menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internal dan 783 kasus menunjukkan ketidakpatuhan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal dan kelemahan peraturan perundang-undangan terhadap opini audit pemerintah daerah masih relatif sedikit. Hal ini diungkapkan oleh (Blume and Voigt, 2011; Olken, 2007 dalam Liu dan Lin, 2012) mengemukakan bahwa jumlah ketidakberesan dalam pendapatan dan belanja pemerintah yang dideteksi oleh institusi audit lokal akan berkaitan secara

signifikan dengan tingkat korupsi di propinsi tersebut sehingga mempengaruhi opini audit pemerintah daerah. Liu dan Lin (2012) mengungkapkan bahwa audit pemerintahan bertujuan untuk memantau, meyakinkan, dan menilai integritas pemerintahan daerah. Melalui pemantauan penggunaan sumber daya publik, audit pemerintahan dapat memperkuat integritas pemerintahan daerah dan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Integritas pemerintahan daerah dirasakan sebagai hal penting dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku entitas pengelola dan penanggung jawab penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah. Dengan adanya integritas pemerintahan daerah, masyarakat mampu turut mempunyai peran serta mengawasi kinerja pemerintahan daerah, sehingga berjalannya pemerintahan daerah tersebut berlangsung sesuai harapan. Menurut pendapat Scott (1997) mengemukakan kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Berdasarkan fenomena atau permasalahan di atas dan masih sedikitnya riset tentang tingkat integritas pemerintahan daerah, maka penelitian ini termotivasi untuk mengambil judul **“Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidapatuhan pada Peraturan Perundang-undangan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa pernyataan dalam latar belakang penelitian, maka rumusan penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian :

1. Apakah kelemahan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap opini hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI?
2. Apakah ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ingin menguji secara empiris audit keuangan negara memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi pada daerah-daerah di Indonesia:

1. Menguji apakah kelemahan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap opini hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI.
2. Menguji apakah ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara taktis maupun secara teoritis bagi pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Berdasarkan pengawasan dan penilaian peran audit pengelolaan keuangan negara, penulis secara hati-hati menguji faktor-faktor yang mempengaruhi opini hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI.
2. Memberikan bukti empiris yang dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai dampak pemeriksaan yang selama ini telah dilaksanakan oleh BPK apakah telah mampu meningkatkan opini hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Memberikan referensi hasil penelitian kepada para pemangku kepentingan akuntansi sektor publik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi opini hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari keseluruhan pembahasan, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan makalah skripsi ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Telaah Pustaka, bab ini merupakan uraian tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan Hipotesis.
- Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan pengujian hipotesis.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang validitas dan reliabilitas, pengujian hipotesis dan pembahasan.
- Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini menguraikan tentang kesimpulan, implikasi dan keterbatasan serta saran-saran.